

## POTENSI KONFLIK DALAM PILGUB JABAR

By : Muradi<sup>□</sup>

Mengerucutnya lima pasang Calon Gubernur (Cagub) dan Calon Wakil Gubernur (Cawagub), Rieke Dyah Putaloka - Teten Masduki diusung PDIP; Dede Yusuf-Lex Laksamana yang diusung Partai Demokrat, PKB, PAN, dan Gerindra; Ahmad Heryawan - Dedy Mizwar diusung gabungan partai politik PKS, PPP, dan Hanura; Irianto M.S. Syafiuddin (Yance) - Tatang Farhanul Hakim diusung Partai Golkar, dan Dikdik Mulyana Arief Mansur - Cecep S. Toyib dari jalur perseorangan yang akan berkontestasi dalam Pemilihan Gubernur (Pilgub) 2013 harus dilihat dalam tiga perspektif.

Perspektif pertama, banyaknya pasangan calon yang maju dibandingkan Pilgub 2008 mengindikasikan bahwa minat politik publik untuk menjadi pemimpin dalam ruang lingkup lokal relative tinggi. Hal tersebut mengindikasikan bahwa partisipasi publik dalam konteks politik cenderung meningkat. Pada Pilgub 2008, hanya ada tiga pasang calon yang diusung oleh partai politik dan gabungan partai politik. Pada Pilgub Jabar 2013 nanti, pasangan calon dari jalur perseorangan juga ikut meramaikan kontestasi lima tahunan di tanah pasundan.

Perspektif kedua, provinsi Jawa Barat menjadi toak ukur dari perolehan suara pada Pemilu Legislatif (Pileg) dan Pemilu Presiden (Pilpres) 2014 mendatang. Waktu yang kurang lebih satu tahun menjadikan Pilgub Jabar dianggap sebagai miniatur pelaksanaan Pileg dan Pilpres 2014. Sekedar gambaran hasil dari Pilgub 2008 lalu menjadi cerminan perolehan suara pada Pileg dan Pilpres 2009.

Perspektif ketiga, Pilgub Jabar 2013 sebagai pertarungan politik bagi masa depan demokrasi di Indonesia yang terbebas dari konflik dan makin dewasa dalam pelaksanaannya. Sentimen etnis dan meragukan kemampuan lima pasangan Cagub-Cawagub mengindikasikan bahwa ada persoalan dalam penentuan Cagub dan Cawagub. Sebagaimana diketahui dari lima pasangan Cagub-Cawagub tidak ada calon yang dianggap orang sunda asli dan tulen (*pituin*). Selain itu tiga dari lima dari pasangan Cagub-Cawagub tersebut berprofesi sebagai artis dan budayawan, yang mana kapasitasnya diragukan oleh sejumlah pihak.

### Potensi Konflik

Tiga perspektif tersebut secara tersirat menegaskan bahwa pelaksanaan Pilgub Jabar 2013 tersebut berpotensi konflik yang serius untuk dicermati. Potensi konflik tersebut bersumber pada lima hal, yakni: Pertama, tidak terwakilinya orang sunda *pituin* yang merepresentasikan keterwakilan politik etnis terbesar di Jawa Barat. Hal ini menjadi catatan serius bagi sejumlah organisasi politik masyarakatan yang bernuansa kəsundaan

---

<sup>□</sup> Penulis adalah Staf Pengajar Ilmu Pemerintahan, FISIP Universitas Padjadjaran, Bandung. Alamat: Jl. Saturnus Utara XIV No. 1, Bandung. Nomor Kontak: 022-7500371 atau 081384330813 (mobile). Email : [muradi\\_clark@unpad.ac.id](mailto:muradi_clark@unpad.ac.id). Rek BCA No. 111-111-0781

seperti Paguyuban Pasundan, Badan Musyawarah Masyarakat (BAMMUS) Sunda, Sundawani, dan sebagainya.

Kedua, dominasi elit partai politik Jakarta dalam menentukan kandidat Cagub-Cawagub dinilai terlalu besar porsinya. Hal ini tercermin bagaimana tidak berdayanya elit politik partai yang ada di Jawa Barat dalam memberikan pengaruh dan usulan yang bersifat konstruktif dalam penentuan calon yang diusung. Ada kecenderungan bahwa elit politik dan masyarakat di Jawa Barat hanya menerima keputusan apapun yang dihasilkan oleh elit politik partai yang bersangkutan.

Ketiga, menguatnya tawar-menawar politik dalam penentuan Cagub-Cawagub, khususnya pada berkembangnya isu Provinsi Cirebon apabila salah satu kandidat yang maju tidak dicalonkan oleh partai politik yang ada dan kalah ada kontestasi Pilgub Jabar nanti Keberadaan Kang Yance yang diusung oleh Partai Golkar setidaknya mengobati kekecewaan masyarakat di Ciayumajakuning (Cirebon, Indramayu, Majalengka, dan Kuningan) karena dua kandidat yang diusulkan, yakni Aang Hamid Suganda, Bupati Kuningan, dan Dedi Supardi, Bupati Cirebon tidak terpilih menjadi Cagub ataupun Cawagub yang diusung PDI P untuk Pilgub Jabar 2013.

Keempat, majunya petahana, baik gubernur maupun wakil gubernur menjadi kandidat bersama pasangannya masing-masing. Keputusan keduanya maju menjadi Cagub yang berpasangan dengan Cawagub lainnya mengindikasikan ketidakharmonisan dan ketidakpuasan satu dengan yang lainnya selama kurang lebih empat tahun memimpin Jabar. Ahmad Heryawan yang memilih Dedy Mizwar sebagai Cawagubnya, dan Dede Yusuf yang meminang Lex Laksamana untuk posisi Cawagub tersebut pada derajat tertentu akan mengganggu kinerja birokrasi dan pelaksanaan program Provinsi Jawa Barat.

Kelima, gradasi dan sebaran pemilih di Pilgu Jabar akan berkorelasi pada dinamika politik yang berkembang. Apalagi besarnya jumlah pemilih di Jawa Barat yang mencapai 36,6 juta menjadi bagian yang serius untuk direbut, bahkan dengan segala cara. Kemungkinan praktik kecurangan dan segala upaya dilakukan untuk mendulang suara agar kandidatnya memenangi Pilgub Jabar ini. Sementara gradasi dan sebaran pemilih juga memberikan kontribusi yang serius bagi menguatnya potensi konflik dalam Pilgub Jabar. Salah satunya adalah perbedaan karakter pemilih akan menciptakan *gap* dan meluasnya potensi konflik antar pendukung lima pasangan tersebut.

Mengacu pada lima sumber tersebut di atas, harus digarisbawahi bahwa demokrasi, pada derajat yang paling sederhana harus dipahami sebagai pertarungan politik yang menghasilkan pemenang yang paling didukung oleh masyarakat. Bahwa ada yang tidak terwakili oleh lima pasangan Cagub-Cawagub harus dilihat sebagai kesadaran politik baru masyarakat Jawa Barat dalam menentukan calon pemimpinnya. Selain itu, organisasi politik kemasyarakatan sunda harus juga melihatnya sebagai bagian dari introspeksi, khususnya dalam melakukan regenerasi kepemimpinan di Jawa Barat.

Selama organisasi kesundaan masih disibukkan oleh eksistensi keetnisan yang membutuhkan, maka selama itu pula figur politik yang dihasilkan tidak cukup memiliki dukungan massif dari publik. Kerinduan akan pemimpin yang berbasis kesundaan harus juga dilihat sebagai kerja politik yang massif dan terencana. Kegagalan BMMUS Betawi untuk mendorong Foke menjadi Gubernur untuk periode kedua harus menjadi pelajaran serius, bahwa mengangkat sentimen keetnisan saja tidak akan dapat mengubah keadaan. Perlu kelapangan hati dan mengakui bahwa ada figur-figur lain yang meski dianggap tidak terlalu *nyunda* tapi memiliki tekad dan integritas dalam memajukan Jawa Barat.

Dengan kata lain mendukung agar Pilgub Jabar 2013 ini terlaksana dengan baik dan menghasilkan pasangan yang didukung oleh publik jauh lebih baik dan mulia. Karena hal tersebut berarti dapat meminimalisir potensi konflik, salah satu yang cukup menghantui adalah pemisahan Ciayumajakuning menjadi provinsi sendiri.